

BAB I

PENDAHULUAN

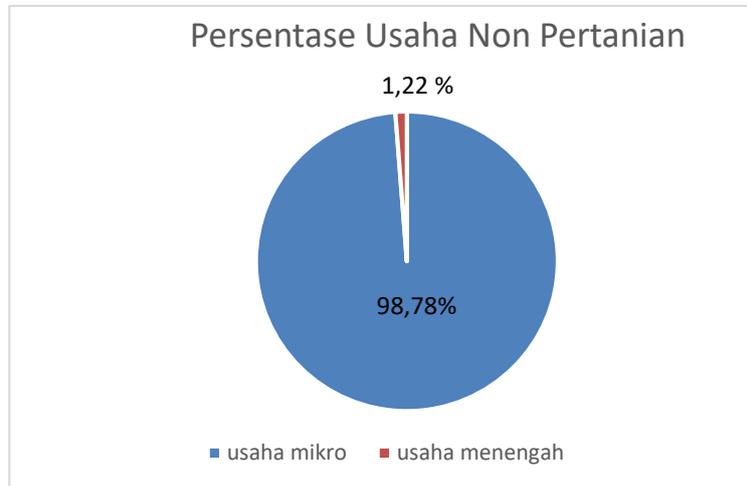
1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor terpenting yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia begitu besar karena dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dari jenis industri bisnis lainnya, sehingga UMKM menjadi penyumbang lebih dari 60% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional (databoks.com). Eksistensi UMKM sebagai pilar perekonomian rakyat masih sangat menonjol, dimana masyarakat dalam sekup individu mampu mandiri menciptakan peluang usaha yang dapat menghidupi dan dapat menjamin kesejahteraan keluarga mereka sendiri atau bahkan dapat memberikan pekerjaan bagi individu lain sehingga tentunya dapat menghidupi keluarganya. Hal itu menunjukkan bahwa UMKM dapat mengatasi masalah pengangguran sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang merupakan masalah klasik bagi negara berkembang (pikiranrakyat.com). Selain itu, kedudukan UMKM di Indonesia teramat penting, karena UMKM mampu bertahan disaat kondisi genting seperti *monetary crisis* pada tahun 1998.

Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DKI Jakarta mencapai lebih dari 1 juta usaha atau 98,78% dari total usaha UMB dan UMK di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan UMKM menjadi usaha yang paling banyak terdapat di DKI Jakarta.

Grafik 1.1

Persentase Usaha Non Pertanian Menurut Status Usaha, 2016

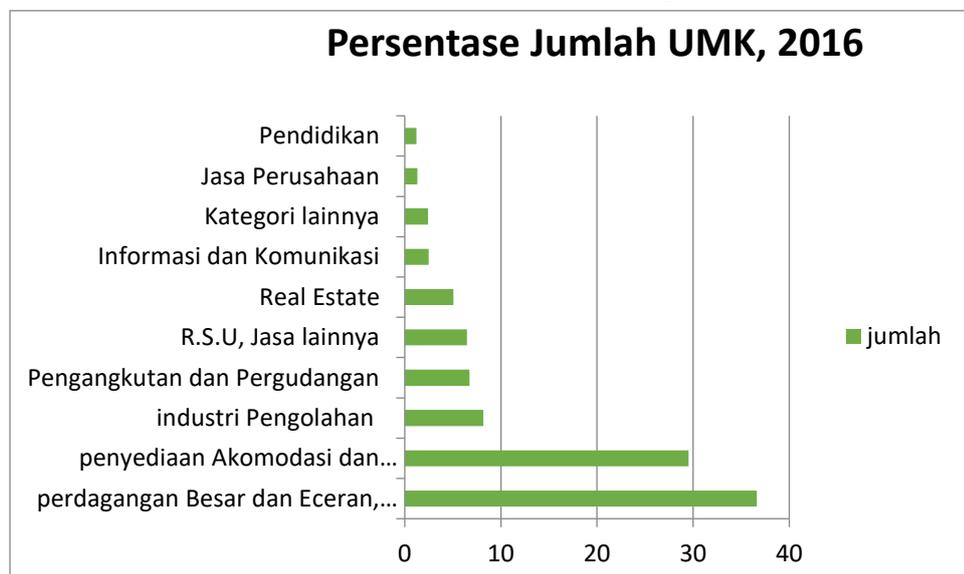


(Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016)

Grafik 1.1 menunjukkan banyaknya jumlah UMKM di DKI Jakarta yang mencapai 98,78% dari total UMB dan UMK, sehingga dapat dikatakan UMKM sebagai usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat DKI Jakarta. Hal ini memberikan gambaran bagaimana pentingnya UMKM dalam menopang perekonomian masyarakat, karena banyak orang yang bergantung dari usaha non formal yang digerakan oleh kekuatan ekonomi masyarakat itu sendiri.

Grafik 1.2

Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2016



(Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016)

Grafik 1.2 menunjukkan prosentase tiap-tiap kategori UMK, dimana kategori perdagangan besar dan eceran dengan prosentase terbesar kurang lebih 36,63%. Para pelaku usaha di pusat-pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pedagang kaki lima termasuk para pelaku usaha di Pasar Tanah Abang merupakan kategori perdagangan besar dan eceran.

Berikut ini adalah data persebaran UMKM yang ada di Jakarta menurut Badan Pusat Statistik Jakarta Tahun 2016 :

Tabel 1.1

Data Persebaran Jumlah UMKM di Jakarta Tahun 2016

| Kabupaten/Kota | Jumlah | Persentase (%) |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Kepulauan Seribu | 3.735 | 0,32 |
| Jakarta Selatan | 224.245 | 19,48 |
| Jakarta Timur | 252.953 | 21,98 |
| Jakarta Pusat | 147.745 | 12,84 |
| Jakarta Barat | 305.076 | 26,50 |
| Jakarta Utara | 217.326 | 18,88 |
| Total | 1.151.080 | 100,00 |

(Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta)

Tabel 1.1 menunjukkan data persebaran jumlah dan prosentase UMKM yang ada di masing masing Kabupaten dan Kota Madya di DKI Jakarta pada tahun 2011. Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Jakarta Pusat yang paling sedikit diantara lima kotamadya di DKI Jakarta. Walaupun jumlah UMK di Jakarta Pusat lebih sedikit, namun Jakarta Pusat memiliki pusat grosir tekstil maupun produk tekstil yang terkenal hingga Asia tenggara yakni Pasar Tanah Abang. Bahan tekstil hingga produk tekstil menjadi komoditi andalan di pasar ini yang mana sebagai tempat berniaga ribuan UMKM. Pasar Tanah

Abang disebut sebagai sentral penjualan pakaian anak-anak hingga dewasa, busana muslim serta Muslimah, celana jeans, perlengkapan haji/umroh, pusat sepatu, pusat tas, batik, bahan tekstil baik dari produk lokal sebanyak 70-75% maupun impor sebanyak 20-25% yang didominasi dari Negara China, para pedagang tersebar di Blok A hingga G (Data teknis PD Pasar Jaya UPB Tanahabang).

Pelaku usaha di Tanah Abang sebagian ada yang menghasilkan produk komoditasnya sendiri yang akan dijual karena memiliki konveksi. Namun ada juga pedagang berperan sebagai distributor, agen dan pengecer yang mengambil dagangannya dari sentra konveksi maupun dari pabrik-pabrik tekstil langsung. Prosentase transaksi bisnis TPT di Tanah Abang diasumsikan mencapai empat puluh persen dari jumlah keseluruhan bisnis produk tekstil dan bahan tekstil pada tingkat nasional. Pasar Tanah Abang memiliki seribu seratus tujuh puluh orang pedagang kaki lima di blok G (Laporan Dinas PPKUKM Jakarta). Berdasarkan data IKAPPI pada tahun 2018, nilai transaksi harian di Pasar tersebut mencapai 200 milyar perhari, perhitungan ini diambil dengan perkiraan pendapatan pelaku usaha sepuluh juta perhari dengan dua puluh ribu kios yang ada di Pasar.

Tabel 1.2

Data Pemilik Kios (UMKM) Di Pasar Tanah Abang Jakarta Tahun 2021

| No. | Lokasi | Jumlah |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Blok A | 4936 |
| 2. | Blok B | 2894 |
| 3. | Blok F | 2008 |
| 4. | Blok G | 1300 |
| Jumlah | | 11.138 |

Sumber : PD Pasar Jaya UPB TanahAbang

Tabel 1.2 menunjukkan data pemilik UMKM yang ada di Pasar Tanah Abang Blok A, B, F, G pada tahun 2021 berdasarkan data teknis PD Pasar Jaya Unit Pasar Besar Tanah Abang, total keseluruhan pemilik UMKM yang ada di Tanah Abang mencapai 11138. Pasar

Tanah Abang merupakan pusat berkumpulnya pelaku UMKM yang Sebagian besar bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil.

Menurut Ketua IKAPPI pada tahun 2018 pengunjung pasar tanah abang mencapai 178 ribu orang/hari. Pengunjung Pasar Tanah Abang dari mancanegara berasal dari Malaysia, Singapura, Brunei, Afrika, Arab Saudi dan lainnya. Moda transportasi yang umum digunakan untuk berkunjung ke Pasar Tanah Abang Jakarta yaitu Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, Bus Transjakarta, Angkot hingga Bus antar kota. Jalan-jalan utama di dekat Pasar Tanah Abang setiap hari dipadati kendaraan pribadi maupun umum. Keramaian aktifitas pasar dapat terlihat mulai dari jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau *skybridge*. Bahkan, akses jalan menuju pusat perbelanjaan dari jembatan penghubung biasanya sudah dipadati oleh pengunjung yang akan keluar maupun masuk Pasar Tanah Abang.

Target sektor tekstil telah mencapai target yang baik saat 2019 tiga bulan awal tahun yaitu 18,98 % (Data Kemenperin), jumlah tersebut lebih baik daripada tahun sebelumnya yaitu 7,46% (bandungberita.com). Menurut PD Pasar Jaya, blok A Pasar Tanah Abang mempunyai lokasi sangat strategis di pusat kawasan niaga dengan lahan 13.000 meter persegi, memiliki rata-rata pengunjung pada hari normal mencapai 80.000 orang/hari baik pengunjung dari Indonesia maupun mancanegara. Nilai transaksi bisnis dan perputaran uang pedagang di Blok A mencapai sekitar Rp.500 miliar per hari. Sirkulasi rupiah biasanya akan mengalami peningkatan saat akan memasuki bulan ramadhan terlebih saat menjelang idul fitri, omset pedagang dapat melonjak 3 kali lipat di bandingkan hari normal. Dimana banyak pedagang dari luar daerah, bahkan luar negeri datang untuk berbelanja ke pusat grosir Tanah Abang (lokadata.com 28 Mei 2019).

Corona Virus Disease 19 ditemukan di Cina dan kemudian penyebaran pandemi ini dengan cepat meluas keseluruh daratan Tiongkok. Skala persebaran virus corona ini

dinaytakan lebih cepat dibandingkan virus-virus yang pernah terjadi seperti ebola, h1n1 , maupun zika (Elisa, M 2020). Pandemi Covid-19 pun masuk ke Indonesia, kasus positif Covid-19 yang teridentifikasi awal pada tanggal Dua Maret Tahun 2020. Dengan meningkatnya kasus positif virus corona, maka pemerintah menetapkan status Keadaan Luar Biasa (KLB). Pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing dan physical distancing. Sosialisasi dilakukan kepada warga masyarakat untuk menjaga jarak tidak berkumpul atau berkerumun, wajib menggunakan *mask* saat keluar rumah dan sering mencuci tangann. Gerakan 3M, menggunakan *mask*, jaga jarak serta mencuci tangan digalakkan guna meminimalisir penularan virus coronaa-19 yang kemungkinan besar dapat terus meningkat diakibatkan oleh kerumunan massa yang terjadi di tempat-tempat keramaian.

Kenyataannya makin hari jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 di DKI Jakarta meningkat drastis sehingga ditetapkan menjadi zona merah pertama di Indonesia. Kemudian status PSBB diusulkan oleh Gubernur DKI yaitu Bapak Anies Baswedan kepada Menteri Kesehatan pada Kamis, 2 April tahun 2020. PSBB adalah pembatasan interaksi sosial warga masyarakat dalam suatu area yang dinyatakan *redzoneeCorona Virus Disease* guna mencegah penularan dan penyebarannya. Untuk melaksanakan PSBB, PerGub Nomor 33 Tahun 2020, kebudayaan, Pendidikan dan keagamaan di DKI Jakarta.

Grafik 1.3

Kasus Harian Covid-19 di DKI Jakarta



(Sumber : Data Corona DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta. Visualisasi Tirto.id)

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa kasus harian yang terpapar positif *Corona Virus Disease* di DKI Jakarta terhitung sejak masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 hingga 28 April 2020 terus mengalami peningkatan. Kebijakan PSBB akhirnya dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai langkah mitigasi penyebaran virus corona di semua daerah yang terdapat kasus Covid-19, terutama zona merah pandemi, namun ternyata disisi lain menyebabkan efek domino bagi sektor perekonomian. Dampak kebijakan PSBB sangat dirasakan oleh sektor perekonomian rakyat yang digerakkan oleh UMKM. Dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung dapat mengancam kelangsungan UMKM, karena kebijakan PSBB benar-benar membuat UMKM kolaps, bahkan mati suri. Kebijakan PSBB membatasi interaksi sosial dan juga membatasi ruang gerak individu. Menurut Mauro&Baldwinn, Perkembangan Virus Corona kedepannya bukan hanya menimbulkan

negative effect pada negara yang terkena imbasnya, namun bisa menimbulkan efek *value chain economic* pada negara lain.

Himbauan melalui sosial media agar berusaha berada dirumah digencarkan apabila jika tak mempunyai kepentingan yang amat penting di luar. Himbauan yang masif disatu sisi menimbulkan ketakutan yang menyebabkan kepanikan di masyarakat. Ketakutan akan terinfeksi virus Corona membuat banyak orang enggan untuk keluar rumah atau lingkungan tempat tinggalnya. Jalan-jalan yang biasanya padat menjadi lengang, pusat-pusat keramaian dan kerumunan massa hampir tidak ada. Oleh sebab itu banyak UMKM yang bersinggungan langsung dengan keramaian masyarakat, seperti pasar dan pusat perbelanjaan secara ekonomi mengalami dampak yang signifikan, tak terkecuali Pasar Tanah Abang.

Gambar 1.1

Pasar Tanah Abang tutup



(Sumber : liputan6.com, 5/5/2021)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa saat awal penerapan PSBB, para pelaku usaha di Pasar Tanah Abang harus menutup usahanya untuk sementara waktu karena diterapkannya kebijakan PSBB. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan massa yang berpotensi meningkatkan penyebaran dan bertambahnya orang yang mengidap *Corona*

Virus Disease di DKI Jakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Dirut Perumda Pasarr Jaya, pengunjung Pasar Tanahh Abang menuju bulan Ramadhan jumlahnya meningkat drastis, pengunjung tersebut berasal dari Indonesia maupun mancanegara, sehingga beresiko menjadi *cluster* baru penularan pandemic Covid-19. Oleh karena itu untuk menghindari lonjakan pengunjung, maka Pasar Tanah Abang dari blok A hingga G ditutup, blok G hanya pedagang makanan saja yang diperbolehkan untuk dibuka. Pasar Tanah Abang ditutup mulai 27-03-2020 sampai dengan tanggal 5-4-2020, kemudian ada himbauan penutupan pasar diperpanjang sampai dengan 15-06-2020 sesuai dengan masa pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta.

Gambar 1.2

Pasar Tanah Abang Kembali Di Buka



(sumber : kompas.com, 15/06/2020)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa setelah hampir tiga bulan Pasar Tanah Abang ditutup, akhirnya Pemprov DKI Jakarta memberikan izin Pasar Tanah Abang untuk beroperasi mulai tanggal 15 Juni 2020. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama PD Pasar Jaya bahwa pengelola membuka kembali blok A, B, F dan G. Pembukaan Pasar Tanah Abang dengan menerapkan prokes untuk mencegah terpaparnya virus Corona dilakukan sesuai masa pemberlakuan PSBB Transisi. Pengelola Pasar Tanah Abang membatasi jumlah

pengunjung dengan menerapkan sistem buka-tutup toko ganjil genap. Dimana toko/kios bernomor ganjil dapat membuka tokos saat tanggal ganjil, begitu juga dengan toko genap. Selain itu juga diterapkan kebijakan jam operasional toko, yaitu dengan membatasi jam operasional toko yang mulai dari pukul 7 pagi hari sampai dengan pukul 2 siang hari. Penerapan sistem satu pintu juga diberlakukan dengan mewajibkan pedagang dan pengunjung pasar mencuci tangan, serta memeriksa *temperature body* sebelum masuk ke Kawasan pasar melalui pintu utama. Para pedagang dan pengunjung juga diwajibkan mengenakan masker dan pihak Pasar Jaya juga sudah menyediakan *face shield* untuk beraktifitas di dalam pasar.

Gambar 1.3

TNI-Polri mensosialisasikan protocol Kesehatan di Pasar Tanah Abang



(sumber : detiknews.com, 31/01/2021)

Gambar 1.3 menjelaskan bahwa sejumlah aparat gabungan turut mengawasi dan menegakan aturan prokes kepada pengunjung dan pedagang selama proses jual-beli. Pembeli dan pedagang masuk area pasar melalui pintu utama, karena gerbang yang menghubungkan antar blok di Pasar Tanah Abang ditutup untuk mempermudah pengawasan. Di Pasar ini hanya 3 pintu di sebelah timur yang digunakan untuk akses

masuk keluarnya pengunjung, 2 pintu disebelah kanan kiri digunakan untuk mengurai padatnya pengunjung yang ingin berbelanja. Jam operasional yang ditetapkan oleh Pengelola Pasar ialah dari jam 7 s/d 14 pada saat PSBB transisi diterapkan. Jika jam operasional bukanya sudah habis, maka aparat TNI menutup pintu utama serta menghimbau pengunjung yang masih berada di area pasar untuk keluar area pasar.

Gambar 1.4

Pasar Tanah Abang sepi pengunjung dan beberapa kios tutup



(Sumber : Megapolitanokezone.com, CNBC.com 16/06/2020)

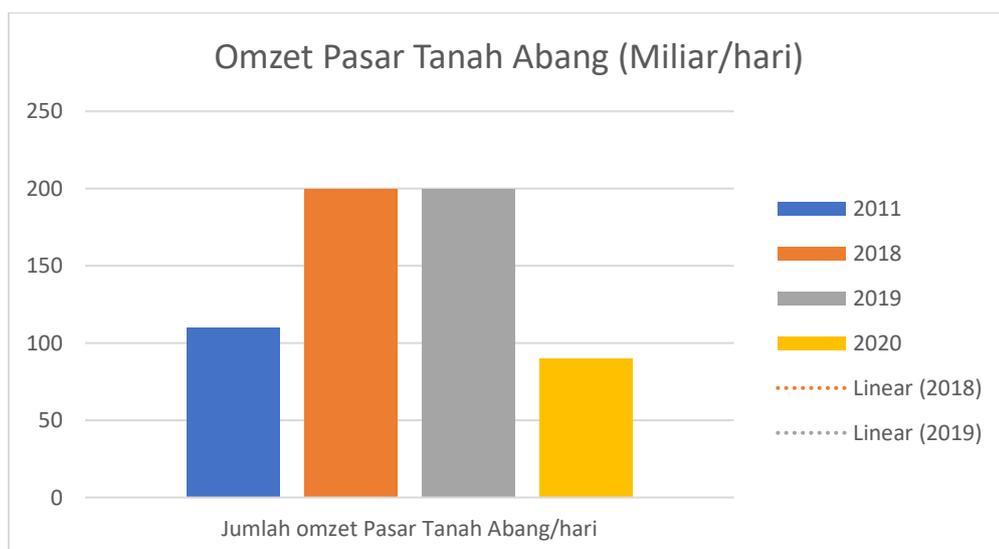
Gambar 1.4 menunjukkan bahwa saat penerapan kebijakan PSBB, kondisi pasar tanah abang menjadi sepi pembeli dan beberapa kios tutup. Penutupan sementara Pasar Tanah Abang saat awal implementasi kebijakan PSBB, juga saat penerapan kebijakan PSBB Transisi dilakukan sebagai mitigasi pandemic untuk menekan angka positif Covid-19, disisi lain menimbulkan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang. Dampak PSBB menyebabkan keterpurukan ekonomi yang dialami oleh para pelaku usaha

yang menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar/bangkrut terjadi, hal tersebut secara tak langsung mendorong para pedagang untuk beradaptasi dan melakukan perbaikan sistem jual-beli. Hal ini tentunya menginisiasi perubahan sosial dalam kegiatan ekonomi di Pasar Tanah Abang. Perubahan sosial yang terjadi menuntut para pedagang untuk dapat lebih adaptif terhadap sistem jual-beli *online*, sehingga mereka tetap dapat *survive* dalam menjalankan usahanya di masa pandemi dan di masa depan. Ada 3 dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha, sebagai berikut :

Pertama, dampak terhadap pendapatan. Penutupan Pasar Tanah Abang diawal masa kebijakan PSBB menyebabkan para pedagang kehilangan pendapatan. Penurunan penghasilan yang drastis tentunya menjadi hal yang nyata dialami oleh para pelaku usaha. Pendapatan pelaku usaha di bulan Ramadhan tahun 2020 mengalami penurunan hingga 90% perhari. Manajemen Pemasaran Pasar Tanah Abang memperkirakan kerugian pelaku usaha pasar ini dikarenakan terhentinya aktifitas berdagang saat pandemic Covid-19 mencapai 4,8 triliun. (republika.co.id 26 April 2020).

Grafik 1.4

Omzet Pasar Tanah Abang Jakarta



(Sumber : Data PD Pasar Jaya, Finance Detik, Berita Satu),

Grafik 1.4 menunjukkan omzet pasar tanah abang berdasarkan data dari pengelola pasar yaitu PD Pasar Jaya UPB Tanah Abang, pada tahun 2011 omzet pasar tanah abang per hari mencapai 120 miliar, tahun 2018 perhari mencapai 200 miliar, pada tahun 2020 dimana terjadi Covid-19 omzet pasar tanah abang turun menjadi 90 miliar perhari.

Pada hari biasa hingga menjelang hari raya tahun 2011, pendapatan per pelaku usaha Tanah Abang mencapai sepuluh juta per hari, jumlah transaksi jual beli di pasar mencapai seratus sepuluh miliar. ([finance.detik.com/29 Agustus 2011](http://finance.detik.com/29-Agustus-2011)). Kemudian, Direktur Utama PD. Pasar Jaya mengatakan “Pada bulan juni 2018, total omzet rata-rata mencapai Rp200 miliar per hari” ([metro.tempo.co/11 Juni 2018](http://metro.tempo.co/11-Juni-2018)). Menurut Promotion Manager Pasar Tanah Abang pada bulan Mei 2019 omzet yang didapatkan oleh para pedagang kurang lebih 150-200 miliar perhari (Data PD pasar jaya). Menurut data dari Waketum APPSI, pasar tanah abang yang mencakup blok AG, Plaza Metro dan skybride memiliki kios dengan jumlah sebelas ribu kios, pendapatan yang biasa diterima kurang lebih lima sampai dengan enam juta. Saat menuju bulan Ramadhan hingga hari raya mengalami peningkatan sebanyak tujuh puluh lima persen hingga seratus persen. Penutupan pasar mengakibatkan turunnya pendapatan per kios kurang lebih sepuluh juta, jika ditotal secara keseluruhan dapat mencapai seratus sepuluh miliar ([beritasatu.com/6 April 2020](http://beritasatu.com/6-April-2020)). BlokA Pasar Tanah Abang terdapat 7834 tempat usaha, Blok B 5168 tempat usaha, BlokG 3869 tempat usaha. Untuk Plaza Metro dan Skybridge bukan PD Pasar Jaya yang mengelola, tetapi swasta (Data Teknis UPB PD Pasar Jaya Tanah Abang).

Menurut Ketua Umum Akumindo, “jika berbicara dari sisi kesehatan penutupan sementara pasar tanah abang merupakan hal yang tepat untuk meminimalisir penyebaran dan penularan Covid-19, namun dari sisi ekonomi hancur lebur, terutama UMKM. Apalagi sejak bulan Januari-Februari para pedagang mengalami penurunan omset karena sepi

pembeli. Saat PSBB karyawan di rumahkan, tidak ada yang beli, tidak ada lagi omset. Mati kan ? ekonomi hancur lebur terutama UMKM.” (void.id 27 Maret 2020).

Pedagang juga mengeluhkan kebijakan yang diterapkan saat pembukaan kembali Pasar Tanah Abang di masa PSBB Transisi. Kebijakan buka-tutup toko ganjil-genap dikeluhkan pelaku usaha karena mereka hanya dapat membuka toko sesuai dengan nomor toko mereka, padahal beberapa pedagang mempunyai dua kios toko yang bersebelahan dengan nomor ganjil genap untuk menampung dagangan mereka, jika mereka mebuca kedua toko tersebut tentunya akan terkena sanksi dari pengelola. Selain itu menurut pelaku usaha, banyak langganan yang berpindah berbelanja ke toko lain, karena ketika pelanggan datang toko mereka tidak buka akibat kebijakan ganjil-genap buka-tutup toko. Kebijakan jam operasional toko yang dibatasi mulai jam tujuh pagi hingga jam dua siang juga dikeluhkan oleh para pedagang. Waktu untuk membuka toko sangat singkat, untuk membereskan dagangan saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Menurut para pedagang kedua kebijakan yang diterapkan saat PSBB Transisi membuat pendapatan para pedagang mengalami penurunan.

Keluhan pelaku usaha di Pasar Tanah Abang yang terdampak dari sisi pendapatan akibat penutupan sementara saat awal PSSB maupun saat PSBB transisi :

1. Salah satu pemilik toko dan konveksi di Pasar Tanah mengatakan bahwa “Biasanya menjelang bulan puasa ini puncak ramainya untuk semua pedagang di Tanah Abang. Sekarang enggak ada pergerakan sama sekali, kalau situasi normal bisa meraup omset hingga Rp150 juta per bulan dengan memproduksi 200 lusin pakaian dalam per minggu. Saya terpaksa merumahkan sekitar 50 orang karyawan karena tidak sanggup meneruskan produksi dan membayar upah mereka. Biasanya dibayar dengan upah harian tergantung produktivitas mereka. Ketika produksi terhenti, pemasukan

mereka juga otomatis terhenti sehingga sebagian besar memilih pulang kampung untuk bertahan hidup.” (aa.com. 27 April 2020)

2. Salah satu pelaku usaha Blok A mengatakan “Kalau secara logika dulu (sebelum pandemi) misalnya 10 juta/minggu, kalau sekarang sudah nggak mungkin karena tidak buka setiap hari. pendapatan harian kemarin). Kayak langganan misalnya datang hari ini, tapi toko tutup. Kan dia akhirnya beli di toko lain. pembatasan jam operasional juga hanya sampai pukul 14.00 WIB dan membuat pendapatan harian turun”. (Cnnindonesia, 16/6/20)
3. Salah satu pelaku usaha yang menjual pakaian di Pasar Tanah Abang mengatakan “Pendapatan kita turun hampir setengah dari biasanya, sekitar 40 persen lah. Soalnya kalau saya, saya juga lakukan penjualan untuk luar kota. Sudah ada pelanggan tetap, jadi pengiriman barang ke sana ada jadwalnya.” (merdeka.com, 18 Maret 2020)

Kedua, dampak terhadap aktifitas ekonomi. Penutupan sementara Pasar Tanah Abang saat awal PSBB praktis menghentikan aktifitas ekonomi, karena para pedagang di blok A, B dan F menutup tokonya, blok G saja yang diperbolehkan buka. Kemudian pada 27 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020, aktifitas ekonomi di ketiga blok tersebut berhenti total dikarenakan adanya kebijakan penutupan pasar, kemudian kebijakan tersebut diperpanjang sampai dengan 15 Juni 2020 sesuai dengan masa pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Pembukaan kembali Pasar Tanah Abang di masa PSBB Transisi ternyata masih sepi pembeli, sehingga belum mampu menggerakkan roda perekonomian di pasar ini. Saat PSBB Transisi aktifitas jual-beli masih jauh dari kata normal bila dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi. Promotion Manager Pengelola Pasar Tanah Abang mengatakan, “Pengunjung pasar hingga saat masih ini jauh dari kondisi normal, tak pernah

mencapai 30% dibanding sebelum pandemi Covid-19 merebak, sekarang jumlah pengunjung malah dikisaran 20-25%”.(kumparan, 15/07/2020). Penurunan jumlah pengunjung salah satu faktor penyebabnya karena meningkatnya korban virus corona di Jakarta. Apalagi dengan ditemukannya 10 orang yang dinyatakan positif Corona di salah satu blok Tanah Abang, turut andil mempengaruhi turunnya jumlah pengunjung.

Penutupan sementara pasar saat awal PSBB dan kebijakan saat PSBB Transisi berdampak pada aktifitas ekonomi di Pasar Tanah Abang seperti penurunan para pelaku usaha di bawah ini :

1. Pelaku usaha baju yang memiliki dua kios di Pasar Tanah Abang mengutarakan “saya sudah tidak dapat berdagang sejak akhir maret 2020 karena ditutupnya Pasar Tanah Abang, kalau keadaan normal menjelang bulan Ramadhan bisa mendapat omzet Rp. 3 s/d 4 miliar, sektor tekstil lumpuh dan gak ada harapan”. (16/4/2020 ([bbc.com/indonesia](https://www.bbc.com/indonesia))).
2. Salah satu pelaku usaha Pasar Tanah Abang Blok A yang menjual gorden mengatakan “seminggu sebelum Pasar Tanah Abang ditutup saya sudah tutup toko karena enggak ada yang beli. Maret itu yang beli cuma langganan saja lewat Whatsapp, Instagram dan itu pun hanya beberapa. Saya sebenarnya enggak tega untuk memphk karyawan, tapi saya enggak tahu lagi gimana harus gaji karyawan untuk beberapa bulan ke depan. Apalagi saya enggak yakin gorden saat lebaran akan laku karena Lebaran dan Ramadan ada potensi Tanah Abang masih ditutup. Kalau situasi normal bisa mendapat keuntungan bersih Rp20 juta per bulan. Sementara pada Maret lalu hanya mendapat Rp4 juta”(tirto.id, 3 April 2020)

Ketiga, dampak terhadap pengeluaran. Sudah jatuh tertimpa tangga itu mungkin gambaran yang tepat untuk menggambarkan nasib para pedagang sebagai pelaku usaha saat penutupan sementara Pasar Tanah Abang. Penutupan toko menyebabkan para pedagang tidak mendapat penghasilan, namun dalam keadaan demikian, para pedagang masih harus membayar biaya keamanan maupun retribusi sebanyak seratus hingga seratus dua puluh ribu rupiah setiap. Selain itu para pedagang masih harus membayar abodemen listrik sebesar 10% dari tagihan bulanan walaupun tidak digunakan, belum lagi cicilan utang ke bank yang terus berjalan. (Katadata.co.id 7 April 2020). Tentunya hal tersebut menambah lengkap penderitaan yang dialami oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang. Dimana saat mereka tidak mendapat pemasukan tapi masih dibebani dengan kewajiban membayar tagihan-tagihan tiap bulannya, termasuk membayar cicilan bank. Selain itu tentunya para pedagang memiliki kewajiban untuk membayarkan gaji bulanan atau pesangon bagi karyawan yang di berhentikan. Belum lagi pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup yang terus merangkak naik di masa pandemi saat ini. Bantuan pemerintah untuk para pelaku usaha tidak kunjung datang, sehingga keadaan ini memicu protes yang dilakukan oleh para pedagang kepada pengelola pasar.

Keluhan beberapa pelaku usaha Pasar Tanah Abang mengenai banyaknya pengeluaran yang masih menjadi tanggung jawab mereka di masa pandemi seperti tersaji di bawah ini :

1. Sala satu pelaku usaha yang menjual pakaian muslim mengaku kesulitan setelah wabah corona menjangkit seluruh wilayah Tanah Air, akibatnya mempengaruhi penjualannya."Wah, pas ada ini aja (corona), jadi sulit. Gini hari aja kita belum dapat modal, terus ditambah ada lock down (PSBB), terus transisi, nambah seret lagi, sekarang gimana coba, pas puasa sepi, pas mau lebaran enggak serame dulu, terus kita makan, rokok bayar, kontrak kios terus". Indra juga mengaku nyaris gulung tikar dan hasil penjualan

mengalami penurunan, sedangkan pengeluaran terus berjalan. (Okezone.com 5/6/2020).

2. Salah satu pelaku usaha Pasar Tanah Abang yang berasal dari Sumatera Barat mengatakan, “setiap hari kami sekarang hanya datang ke tanah abang meski tidak membuka dagangan, karena kondisi seperti ini, yang ada saja dihabiskan sementara uang masuk tidak ada, adanya virus corona ini penghasilan kami nihil setiap harinya sedangkan biaya kehidupan tetap ada, yang jelas selama social distance diserukan, dan adanya instruksi tanah abang ditutup sementara waktu, kami sangat memahami bahwa Tindakan ini harus dilakukan” ungkapnya.(Jurnalsumbar.com, 1/4/2020)

Dampak PSBB mengakibatkan keterpurukan ekonomi bagi para pelaku usaha akibat penutupan sementara pasar di awal PSBB, maupun saat pembukaan kembali pasar saat PSBB transisi dengan kebijakan buka-tutup toko ganjil-genap dan pembatasan jam operasional toko yang membuat banyak para pelaku usaha yang nyaris gulung tikar bahkan juga banyak yang sudah bangkrut dan menutup tokonya akibat tidak mampu lagi untuk menutup biaya operasional toko, karena pendapatan para pelaku usaha yang menurun drastis, tetapi sementara mereka masih harus menanggung biaya pengeluaran untuk biaya operasional toko. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak PSBB, pemerintah melakukan upaya dengan membagikan bantuan berupa sembako. Pelaku usaha juga berusaha untuk mengurangi/meminimalisir dampak PSBB yang mereka alami karena banyaknya pengeluaran yang harus mereka tanggung di saat omzet pendapatan mereka menurun drastis. Selain itu pelaku usaha juga berusaha agar toko mereka tetap dapat *survive* untuk melewati masa pandemi. Para pelaku usaha selain melakukan penjualan secara langsung juga melakukan penjualan secara *online*.

Penjualan secara *online* juga dilakukan oleh para pelaku usaha, karena mereka harus mencari jalan keluar untuk tetap dapat memasarkan produknya saat para pelanggan terkendala waktu untuk bertemu secara langsung di pasar. Dalam keadaan normal pasar adalah suatu tempat dimana terjadinya aktivitas menjual atau membeli produk barang ataupun jasa antara penjual&pembeli. Namun sejak terjadi pandemi Covid-19 dengan kebijakan PSBB, pasar konvensional yang mempunyai bangunan fisik banyak ditinggalkan oleh konsumen. Alasan takut terpapar Covid-19, serta kepraktisan berbelanja membuat konsumen beralih berbelanja secara *online*. Pemerintah pun menyarankan masyarakat untuk membiasakan berbelanja secara *online* yang disosialisasikan melalui media-media elektronik. Penjualan secara online menuntut para pelaku usaha untuk adaptif dalam penguasaan teknologi modern yang digunakan dalam aktifitas jual-beli *online*. Para pelaku usaha juga di tuntut memiliki kemampuan *marketing* dan manajerial yang mumpuni secara *online*. Kualitas produk yang dijual perlu dijaga, diperhatikan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pedagang karena hal itu sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha di Pasar Tanah Abang untuk dapat tetap *survive* menjalankan roda bisnis toko yang mereka kelola.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penerapan kebijakan PSBB untuk meminimalisir dan menghentikan laju penyebaran Covid- 19, namun di satu sisi menimbulkan dampak ekonomi bagi para pedagang tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai pelaku usaha. Dampak ekonomi yang dialami oleh para pelaku usaha dapat teridentifikasi dari keluhan-keluhan para pedagang mengenai kebijakan PSBB yang berdampak pada pendapatan, aktifitas ekonomi dan pengeluaran. Dampak ekonomi tersebut mengancam keberlangsungan toko yang dikelola oleh para pelaku usaha, karena usaha yang mereka kelola kolaps, mati suri bahkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar/bangkrut. Upaya mengurangi dampak PSBB yang menyebabkan keterpurukan

ekonomi para pelaku usaha di Pasar Tanah Abang dilakukan oleh pemerintah juga oleh para pelaku usaha itu sendiri untuk menjalankan usaha yang mereka kelola agar dapat *survive* melewati masa pandemi. Oleh karena penulis tertarik mengambil judul penelitian “Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta.”

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, Judul, Jurnal, Tahun | Tujuan Penelitian, Metode Penelitian | Hasil penelitian | Perbedaan Penelitian |
|------------|---|---|---|---|
| 1. | Isna Fitria Agustina dan Ricka Octaviani. (2016). “ <i>Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon</i> ”. JKMP Vol. 4 No. 2. | Untuk menganalisis kebijakan dari penyusunan kebijakan dan eval. Tujuannya ialah guna mengetahui apa saja dampak sosial ekonomi dari <i>policy</i> pengembangan suatu Kawasan di daerah Jabon. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. | kebijakan yg diterapkan memunculkan dampak positif berupa adanya pendidikan, infrastruktur jalan dan juga kesehatan yang memadai. Disisi lain kebijakan ini memunculkan efek negative berupa adanya praktik prostitusi pada lokus tersebut. Dampak secara ekonomi, juga masih terlihat dikarenakan pelaksanaannya yang belum maksimal. | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB Sedangkan penulis jurnal ini mengulas dari sisi dampak positif maupun negative yang dimunculkan dari penerapan pengembangan Kawasan Jabon. |
| 2. | Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja. (2013). <i>Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial EKonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman.</i> | Untuk menemukan kondisi riil sosial ekonomi serta menganalisis dampak kebijakan pertambangan batubara dan merekomendasikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat | Intinya bahwa peneraan kebijakan pertambangan batubara memunculkan dampak positif berupa peluang ekonomi warga untuk membuka warung klontong maupun makanan serta mengontrakkan rumahnya. Namun, kebijakan ini ternyata juga memunculkan dampak negative berupa konflik | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta, menganalisa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB Sedangkan penelitian Semuel Risal mengamati |

| No. | Nama, Judul, Jurnal, Tahun | Tujuan Penelitian, Metode Penelitian | Hasil penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|--|--|--|--|
| | Journal Administrative Reform, Volume 1, Nomor 1 Hal. 1-11 | Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif | masyarakat dengan pihak pengelola karena lahan pertanian warga muncul banjir lumpur yang mana membuat ekonomi warga yang berasal dari pertanian mengalami penurunan yang cukup drastis. | dampak sosial dan ekonomi masyarakat lokus tersebut yang ditimbulkan akibat pertambangan tersebut. Selain itu, menganalisa dampak pada <i>social and economy life</i> masyarakat di kelurahan Makroman. |
| 3. | Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut, karya Irma Ayu Sundari dan Dian Kagungan. Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 1 No. 1 Tahun 2019 | Memiliki tujuan guna menganalisa apa saja dampak yang muncul akibat <i>policy</i> pembangunan jaringan listrik pada lokus tersebut di bawah laut. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. | Peneliti mengamati dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dengan melihat 3 aspek yakni dari sisi sosial budaya dan lingkungan. | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB Sedangkan, penelitian Irma Ayu dan Dian Kagungan mengevaluasi dampak buruk maupun buruk pada pembangan jaringan listrik bawah laut kebijakan dari sisi aspek sosial budaya, dan lingkungan. |
| 4. | Nurhalimah, Sri Marwati dan Heru Irianto. (2017). <i>Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Di Tamperan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.</i> Jurnal Agrista Vol. 5 No 1 | Bertujuan untuk mengetahui perubahan before dan after sosial ekonomi masyarakat pelabuhan saat diterapkannya pembangunan pelabuhan tamperan, paceitan. Penulis menggunakan metode analitis deskriptif. | Penulis melihat dampak tersebut dari perubahan sisi before dan after penerapan pembangunan juga pengembangan pelabuhan. Apakah kesempatan kerja ada saat pembangunan tersebut diadakan, ternyata masyarakat untuk membuka usaha dengan menyesuaikan kondisi di pelabuhan tersebut. Artinya ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB Sedangkan penelitian Nurhalimah, dkk menganalisis perbedaan keadaan sosial ekonomi masyarakat sesudah dan sebelum diterapkannya kebijakan. |
| 5. | Pandu Pratomo, Sri Suwiti dan Ari Subowo.(2013). | Bertujuan untuk menganalisa apa saja efek dari kebijakan | Hasilnya menyatakan bahwa penelitian ini memetakan apa saja | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis dampak kebijakan PSBB |

| No. | Nama, Judul, Jurnal, Tahun | Tujuan Penelitian, Metode Penelitian | Hasil penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|--|---|---|---|
| | "Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011)." Administrasi Publik FISIP UNDIP | mengenai penerimaan siswa baru SMPN 3 Semarang guna menyelesaikan persoalan prestasi akademik pada proses seleksi masuk sekolah menengah pertama jalur reguler. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif | dampak yang muncul dari kebijakan tersebut, baik dari sisi internal seperti ketersediaan data, Lembaga organisasi maupun dampak dari sisi eksternal yakni lingkungan, masyarakat, ekonomi dan psikologis. | terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB Sedangkan penelitian Pandu Pratomo, dkk menganalisis dampak yang ditinjau dari dampak internal seperti ada atau tidaknya data dan lembaga organisasi, sedangkan dampak eksternal seperti ekonomi dan psikologis masyarakat . keadaan masyarakat eksternal. |
| 6. | <i>Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang.</i> Karya Stephani Nora Tahalea, Sri Suwitri dan Dewi Rostyaningsih. Tahun 2015 pada Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 3 Universitas Diponegoro | Untuk mengetahui dampak dari PPTSP, aspek yang diharapkan dan tidak terduga dari individu, organisasi, institusi dan sistem sosial. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. | Penulis mengutarakan bahwa <i>policy</i> PTSP saat ini blm memberikan dampak positifnya. Koordinasi BPPT dan instansi terkait harus ditingkatkan dan dalam pembuatan kebijakan para pemangku kepentingan harus mengambil Tindakan antisipatif untuk mengatasi dampak yang diluar harapan. | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB Sedangkan, penelitian dari Stephani Nora, dkk meninjau dampak kebijakan dari aspek yang diharapkan dan tidak terduga dari individu, organisasi, institusi dan sistem sosial |
| 7. | Kismartini, yang berjudul Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Di Kabupaten Rembang. Jurnal | Untuk mengevaluasi apa dampak dari penerapan kebijakan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir di lokus tersebut. | Penelitiannya mengungkapkan dampak positif ataupun negative. Salah satu dampak kebijakannya ialah belum tercapainya tujuan kebijakan karena adanya hambatan pada saat penerapan. Dampak | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku |

| No. | Nama, Judul, Jurnal, Tahun | Tujuan Penelitian, Metode Penelitian | Hasil penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----|---|---|--|--|
| | MKP Universitas Diponegoro | Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif | ekonomi yang dihasilkan juga dirasa kurang optimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah Rembang. | usaha untuk mengatasi dampak PSBB. Sedangkan, penelitian Ali Roziqin dan Kismartini menganalisis gejala/ dampak yang ditimbulkan dengan mengkolaborasikan dimensi dampak kebijakan seperti dampak masyarakat, lingkungan dan ekonomi. |
| 8. | Denny Dwi ,Haartono, dan Dwi, dengan judul Faktor Yang Mempeengaruhi Perkembangan UMKM Di Surakaarta pada Jurnal Biisnis dan Manajemen Hal. 15-30 | Bertujuan untuk menganalisis faktor yg turut memengaruhi perkembangan UMK di lokus tersebut. Penulis menyumbang rekomendasi kebijakan sebagai output. | Penulis mengutarakan bahwa persoalan UMKM dilokus ini ialah mengenai biaya permodalan, cost production, ongkos tenaga kerja. Sehingga strategi yang digunakan utung mengembangkan usaha mikronya ialah menekankan pada pemenuhan dan ketersediaan bahan baku untuk produksi, akses modal, maupun saat memasarkan produk. | Pada penelitian kali ini penulis menganalisis penerapan PSBB di Pasar Tanah Abang Jakarta, menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak kebijakan psbb. Sedangkan Denny membahas indikasi yang mempunyai pengaruh kepada perkembangan UMK dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha mikro kecil pada locus tersebut. |

Sumber : Diolah peneliti, 2021

Tabel 1.3 penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai acuan atau referensi untuk meneliti topik penelitian, sebagai bentuk perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan mendukung kekuatan penelitian penulis karena dengan adanya referensi ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis. Penulis menguraikan beberapa perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, walaupun terdapat beberapa kesamaan dalam fokus penelitian mengenai dampak kebijakan dan metode yang digunakan, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara lain lokus penelitian berada di Pasar Tanah Abang Jakarta, fokus terhadap bagaimana dampak

kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB.

1.2 Identifikasi masalah

- 1.) Kebijakan PSBB dan PSBB Transisi di Jakarta diterapkan sebagai mitigasi Pandemi Covid-19, namun disisi lain menyebabkan UMKM di Pasar Tanah Abang kolaps, mati suri, bahkan banyak yang gulung tikar.
- 2.) Pendapatan para pelaku usaha tekstil dan produk tekstil (TPT) saat penerapan kebijakan PSBB menurun drastis.
- 3.) Pembukaan kembali Pasar Tanah Abang dengan kebijakan buka-tutup toko ganjil-genap, maupun pembatasan jam operasional belum mampu memulihkan aktifitas ekonomi di Pasar Tanah Abang Jakarta.
- 4.) Para pelaku usaha di Pasar Tanah Abang mengeluhkan banyaknya pengeluaran yang masih menjadi kewajiban mereka di saat pendapatan mereka menurun drastis. Hal tersebut mempengaruhi ketahanan para pelaku usaha untuk dapat *survive* melewati pandemi.
- 5.) Selain melakukan jual beli langsung di pasar, pelaku usaha melakukan jual beli secara online melalui WA dan *e-commerce*.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.) Bagaimana dampak kebijakan PSBB terhadap ekonomi pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta ?
- 2.) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi kebijakan PSBB ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Untuk menganalisis dampak kebijakan PSBB terhadap ekonomi pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta
- 2.) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi dampak PSBB

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, pengembangan pengetahuan ilmu administrasi publik khususnya pada bidang kebijakan publik serta pada dampak kebijakan PSBB terhadap pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- 1.) Kepada instansi

Menyumbang pandangan juga rekomendasi penulis kepada stakeholder atau pihak instansi terkait mengenai Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta.

- 2.) Kepada Penulis

Memberikan pembelajaran bagi penulis untuk melihat dan memahami fenomena yang diteliti dan harapannya dapat membagikan hasil pengalamannya kepada lingkungan sekitar dan masyarakat luas.

3.) Kepada Pembaca

Menambah cakrawala pengetahuan mengenai Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi menurut Damai Darmadi Sudikin 2009: 4, dapat dimaknai sebagai proses mengelola sumber sumber seperti SDM, harta benda untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Liang Gie (dalam Darmadi Sadikin, 2009 : 5) juga mengutarakan bahwa administrasi dapat dimaknai sebagai proses kerja sama baik kelompok maupun individu dalam penyelenggaraan suatu organisasi agar terlaksana tujuan yang telah disepakati.

Rosenbloom (dalam Darmadi Sukidin 2009 : 5) menuturkan, Administrasi publik diartikan sebagai proses yang diawali dari pembelajaran teori kemudian ditransfer menjadi proses politik hukum guna melaksanakan instruksi pemerintahan dan melayani, mengatur seluruh elemen masyarakat. Beliau menekankan pada aspek kekuasaan yakni legislative, eksekutif dan yudikatif.

Public Administration dapat diartikan sebagai suatu tahapan untuk mengatur (*to manage*) sumber-sumber daya dan *public personal* di dalam suatu organisasi. Selanjutnya terdapat tahapan formulasi, implementasi, dan mengatur keutusan kebijakan yang telah ditetapkan. *Public Administration* dianggap

sebagai *art science* yang memiliki tujuan untuk mengelola kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang muncul (Chandleer&Planoo dalam Anggara, 2012).

Kemudian, Nicholas Henry (dalam Anggara, 2012) memandang administrasi public sebagai perpaduan antara teori yang ada dengan praktik dilapangan, dan memiliki tujuan untuk mensosialisasikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, agar kebijakan yang diterapkan dapat mencapai kebutuhan masyarakatnya. Menurut J. M. Priffner (dalam Darmadi Sukidin, 2009:10) melihat administrasi public sebagai perpaduan usaha guna melaksanakan dan mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh actor kebijakan (pemerintah).

Sahya Anggara dalam bukunya (2012 : 48) mengutarakan administrasi public dilihat sebagai sesuatu yang berhubungan dengan proses formulasi hingga penerapan suatu kebijakan, sesuatu yang berhubungan dengan institusi legislative, eksekutif maupun yudikatif sebagai Lembaga yang mempraktikan, dimaknai sebagai sesuatu yang mengutamakan *good service* untuk public, administrasi public mempunyai tugas untuk making policy yang baik guna menyelesaikan persoalan pada khalayak public.

1.6.2 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (dalam Anggara, 2012) mengutarakan bahwa *paradigm of public administration* dibagi menjadi lima, sebagai berikut :

- 1) Paradigma 1 mengenai Dikotomi Politik Administrasi, pada tahun 1900 sampai dengan 1926. Goodnow dan L. D. White melihat bahwa pemerintah memiliki tupoksi yang berbeda, yaitu antara politik dengan administrasi. Administrasi dimakanai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan penerapan kebijaksanaan dan kebijakan, sedangkan politik

dimakanai sebagai sesuatu yang menghendaki dan melahirkan kemauan negara dalam melaksanakan kebijakan. Pada paradigma ini menekankan bahwa terdapat dua posisi yang berbeda antara dimana posisi administrasi public/negara, menurut paradig ini posisi administrasi public tberada di birokrasi institusi pemerintah.

- 2) Paradigma 2 mengenai Prinsip prinsip Administrasi, pada tahun 1927 sampai dengan 1937. Willoughby (1927) mengeluarkan buku Prinsip Administrasi Publik. Buku yang dikeluarkan membuktikan mengenai prinsip administrasi public dapat dipelajari Dari fase ini administrasi public mencapai posisi reputasi tertinggi, dan pada fase inilah muncul perkembangan manajemen yang mempengaruhi prinsip prinsip administrasi. Dalam paradigma ini, prinsip tersebut diterjemahkan bahwa administrasi public/negara dapat ditempatkan dibidang mana saja, tanpa melihat fungsi, visi misi, lingkungan sekitar, budaya yang ada maupun kerangka institusi.
- 3) Paradigma 3 mengenai Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik pada tahun 1950 sampai dengan 1970. Paradigma ini mengaitkan antara ilmu administrasi negara/public dengan ilmu politik. Definisi lokusnya terletak pada birokrasi, pemerintahan. Pada masa ini terjadi roses penetapan ulang konseptual antara ilmu politik dengan ilmu administrasi public/negara. Perkembangan yang terjadi bahwa penekanan di paradig ini ialah dimana letak kepentingan-kepentingan ilmu politik. Pada paradig ini pula muncul studi komparasi dan

pembangunan ilmu administrasi sebagai bagian dari ilmu administrasi public/negara. Studi kasus juga menjadi suatu wadah baru hasil perkembangan yang digunakan pada paradigma ini.

- 4) Paradigma 4 mengenai Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, (1956-1970). Makna *Administrative science* dalam paradigma ini memperhatikan fokus dan isi pembahasan-pembahasan terkait dengan *management sciend* dan teori dalam organisasi. Lokus ilmu administrasi tidak menjadi pembahasan pada paradigma ini. Fase ini menawari Teknik yang membutuhkan suatu pada fase ini muntut menyelesaikan persoalan yang memerlukan spesialisasi dan keahlian. Persoalan yang ada pada fase ini tentu banyak persoalan seperti jika salah satu fokus telah diambil oleh administrasi negara seperti ilmu administrasi dan perlu dipertanyakan apakah administrasi negara dapat menjawab persoalan public, tentunya persoalan persoalan tersebut dan perlu dihadapi.
- 5) Paradigma 5 mengenai Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara tahun 1970. Paradigma ini menerangkan bahwa administrasi negaara memiliki fokus diantaranya teori maupun praktik dalam organisasi, praktik dalam menganalisa *management* maupun *public policy* yang telah berkembang dan maju. Lokus pada paradigim ini ialah kepentingan public. Pada fase ini *publicness* menjadi perhatian khusus. Administrasi negara meruakan studi ilmu kebijakan membuat ilmu administrasi negara menjadi lebih dinamis, ilmu administrasi public

berbicara mengenai birokrasi yang fokus terhadap *public service* melalui sebuah kebijakan.

1.6.3 Kebijakan Publik

Menurut C.Friedrich (dalam Anggara, 2012) *policy* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh perorangan, pemerintah maupun kelompok pada lingkungan untuk mengatasi suatu permasalahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Thomas R. Dye (dalam Dye, 2012) mengartikan *public policy* sebagai sesuatu yang telah dipilih oleh pemerintah baik untuk dilaksanakan maupun tidak. Tiga elemen yang terkandung dalam ungkapannya yaitu *public policy*, *actor of policy and* dan lingkungan kebijakan publik. Erwan A. P (2017) juga mengartikan kebijakan public sebagai suatu instrument yang digunakan pemerintah guna mengatasi persoalan public dengan memutuskan alternative kebijakan terbaik.

Anderson (dalam Agustino, 2017) turut mengungkapkan terdapat 3 unsur dalam kebijakan yakni *public policy*, *actor of policy dan* lingkungan kebijakan berada. Beliau mengungkapkan bahwa kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan maupun keputusan yang dicetuskan oleh actor kebijakan untuk menghadapi suatu permasalahan yang muncul. Sedangkan Amir S. mengutarakan bahwa *public policy* terbagi menjadi dua konsentraasi yakni pertama implementasi dan dampak kebijakan , kedua fokus terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertiannya, maka kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan guna mengatasi persoalan public demi tercapainya target tujuan yang ditetapkan.

1.6.4 Evaluasi Kebijakan

Anderson (dalam Agustino, 2008) mengartikan bahwa evaluasi kebijakan yakni suatu tahapan untuk menilai substansi kebijakan, pelaksanaan, dan dampak dari penerapan kebijakan.

Briant and white (dalam S. Wibawa 1994 : 63) mengartikan bahwa kegiatan menilai evaluasi kebijakan dilaksanakan saat penerapan kebijakan, kemudian dapat menilai bagaimana akibat dan hasil dari penerapan tersebut, tahapan policy evaluation perlu dapat menerangkan apakah penerapan kebijakan telah mencapai tujuan yang dicanangkan.

Stewart&Lesterr (dalam Subarsono 2016 :120) menerangkan bahwa policy evaluation mendalami imbas/efek dari *public policy*, mempelajari faktor penyebab gagalnya penerapan kebijakan, dan melihat ketercapaian dampak yang diharapkan. Sitorus (dalam Subarsono, 2016) mengartikan evaluasi kebijakan sebagai process dalam melihat apa saja resiko/imbats dari penerapan sebuah kebijakan konsekuensi dari suatu kebijakan untuk menambah referensi saat menerapkan kebijakan lainnya.

Subarsono dalam bukunya (2016 : 119) mengutarakan mengenai evaluasi kebijakan yang mana dianggap sebagai langkah penilaian performa sebuah penerapan kebijakan, sedangkan W. Dun (1999 : 608) mengutarakan mengenai evaluasi kebijakan yang diartikan sebagai pembuatan sejumlah *information* tentang faedah dan nilai dari penerapan kebijakan. Dye (dalam Parson,2008:547) mengartikan evaluasi kebijakan dianggap sebagai proses pembelajaran mengenai

imbas/dampak yang diberikan dari *public policy*. Tahap ini dianggap sebagai langkah untuk memeriksa kebijakan secara empiris, factual, ilmiah dan sistematis berdasarkan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi yang tertera pada evaluasi kebijakann yang sudah katakana oleh ahli-ahli, maka evaluasi kebijakan adalah kegiatan atau proses menilai sejauhmana manfaat dan dampak yang dihasilkan setelah implementasi kebijakan.

Subarsono (dalam bukunya, 2016) mengutarakan bahwa evaluasi kebijakan mempunyai tujuan khusus antara lain ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat tercapainya tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui efisiensi kebijakan berupa kebermanfaatan dan *cost* dari penerapan kebijakan, mengetahui *outcome* kebijakan yang telah diterapkan, mengetahui dampak diterapkannya kebijakan, melihat apakah terdapat kesenjangan antara penerapan dengan target yang telah ditetapkan, untuk menjadi referensi kebijakan selanjutnya, memberikan rekomendasi kebijakan selanjutnya.

Evaluasi kebijakan dianggap perlu untuk kebutuhan sustainable programme, adanya evluasi kebijakan membuat sebuah kebijakan lebih baik daripada sebelumnya karena telah mengetahui kekurangannya. (Subarsoono,2016). Berikut ini beberapa alasan pentingnya mengevaluasi suatu kebijakan antara lain : guna efektivitas dari kebijakan yang diterapkan apakah telah mencapai target tujuan yang telah disepakati, melihat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, untuk mencukupi *value of public accountability*, mempertunjukkan kepada elemen terkait mengenai kebermanfaatan kebijakan, yang terakhir antisipasi untuk tidak mengulang kesalahan yang sama agar kebijakan selanjutnya lebih maksimal saat diterapkan.

Untuk melakukan evaluasi kebijakan menurut E. suchman (dalam Winarno, 2004 : 169) membutuhkan 6 cara antara lain : perlu identifikasi apa tujuan program kebijakan, menganalisa suatu masalah, menggambarkan tolok ukur kegiatan, mengukur apa saja perubahannya, melihat apakah terdapat perubahan setelah diterapkannya program/kegiatan tersebut, perlu memperhatikan indicator suatu dampak. Selanjutnya jika telah mengetahui masalahnya, peneliti perlu menyiapkan beberapa poin poin untuk melakukan evaluasi antara lain : apa tujuan program kegiatan, siapa subjek program, harapan perubahan, berapa banyak tujuan yang ditetapkan, seberapa besar dampak yang diharapkan, bagaimana cara agar tujuan bisa tercapai.

Sitorus (2012 : 160) mengungkapkan untuk mengevaluasi suatu kebijakan diperlukan beberapa langkah antara lain : penetapan tolok ukur yang ditetapkan saat proses perencanaan, membuat *guidance* guna menjadi pedoman dalam menentukan indicator, memantau laporan informasi kegiatan, melakukan riset dengan melakukan perbandingan antara pelaksanaan program dengan pedoman yang digunakan, melakukan perbaikan pelaksanaan,

W. Parsons (2006 : 547-548) menyebutkan terdapat model *policy evaluation* ada dua yakni, pertama evaluasi formatif yaitu evaluasi kebijakan saat penerapan, evaluasi ini menganalisa apa saja formula yang dibutuhkan untuk membuat proses implementasi berhasil dan sejauhmana program diterapkan. Ahli lain mengatakan bahwa evaluasi ini dapat dibagi menjadi 3 unsur pertama apakah program dapat mencapai target yang direncanakan, bagaimana konsistensi pelayanannya sesuai rencana program, SDM yang digunakan. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan memberikan sumbangsih pada target yang direncanakan. Model ini dikenal sebagai *compare model* yang digunakan untuk

mengukur *before and after implementation of programme*, memandangkan dampak yang ditimbulkan antara kelompok subjek dengan kelompok lainnya, memandangkan fakta dan kemungkinan yang terjadi, memandangkan akibat dampak kebijakan yang diterapkan pada satu wilayah.

Sugiyono (2012 : 109) mengutarakan bahwa evaluasi memiliki 2 jenis antara lain : Pertama evaluasi formatif yang diartikan sebagai evaluasi yang berfokus pada tahapan proses dan mempunyai kehendak agar mendapat umpan balik dari suatu langkah yang nantinya dapat dipergunakan untuk meraih kualitas program yang maksimal, sedangkan evaluasi sumatif diartikan sebagai tahapan mengevaluasi ketepatan pencapaian pelaksanaan program kegiatan.

F.H. George, 2012 (dalam Sitorus, 2012:173) mengungkapkan terdapat perbedaan antara evaluasi formatif dengan evaluasi sumatif, antara lain : Fokus evaluasi formatif yakni memberikan informasi akurat kepada pelaksana, yang merencanakan pada saat program kebijakan yang sedang dijalankan, Fokus evaluasi sumatif ialah melakukan penilaian terhadap dampak dan *quality of programme* untuk mempertanggung jawabkan pembuatan kebijakan.

1.6.5.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dunn (dalam bukunya 2003 : 429) mengutarakan bahwa kebijakan yang diterapkan tentu memberikan hasil mengenai kinerja kebijakan, dimana terdapat kriteria-kriteria dalam memberikan penilaian antara lain: pertama efektivitas kebijakan apakah hasilnya tercapai dan sudah sesuai yang direncanakan, efisiensi dimaknai usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih target yang ditetapkan, kecukupan dimaknai sebagai bagaimana

pencapaian hasil yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan, perataan dimaknai sebagai biaya maupun kebermanfaatan pendistribusian yang merata, apakah penerapan kebijakan dapat memberikan kepuasan bagi kelompok lain, dan terakhir ialah ketepatan yang dimaknai sebagai tujuan yang ditetapkan apakah bernilai dan berguna.

Kriteria yang digunakan untuk evaluasi suatu kebijakan ada 4 antara lain menurut Davis&Bridgman (dalam BajuriYuwono, 2003) : Pertama input, fokus untuk menilai terhadap sumber-sumber pendukung untuk menerapkan suatu kebijakan, indicator yang digunakan dapat dilihat dari *SDM, money and infrastructure, etc.* Kedua *process*, kriteria ini fokus untuk menilai apakah suatu kebijakan dapat diubah kedalam *public service*, aspek yang dilihat dari indicator efisiensi dan efektifitas dalam menerapkan suatu kebijakan. Ketiga, output, kriteria ini fokus untuk menilai hasil produk kebijakan public, dilihat dari peserta yang berpartisipasi dalam suatu program. Keempat *outcome*, fokus terhadap dampak yang dirasakan oleh publik.

1.6.5.2 Metode Evaluasi

Menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono, 2005:128), untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih yakni:

- a. Single program after – only yaitu informasi diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran sesudah program dijalankan.
- b. Single program before – after yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan perubahan keadaan sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.

- c. Comparative after – only yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan sasaran dan bukan sasaran program dijalankan.
- d. Comparative before – after yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan. (Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono, 2016:130)

1.6.5.3 Evaluasi Dampak

Selain itu, definisi evaluasi dampak kebijakan menurut Kismartini dan Ali Roziqin (2016) yaitu evaluasi yang memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan dengan proses pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi dampak menurut Sri Suwitri, Dewi Rostyaningsih dan Stephani Nora Tahalea (2015), merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator didalam evaluasi kebijakan, Evaluasi dampak lebih berfokus pada output dan dampaknya dibandingkan pada prosesnya. Fokus evaluasi dampak berfokus terhadap hasil *output* maupun dampak yang muncul.

Menurut pendapat Rossi Islamy (dalam Widodo, 2009 : 121) mengemukakan bahwa evaluasi dampak bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan/proyek dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan dua pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah kebijakan/proyek menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan ?
- b. Apakah perubahan tadi merupakan perubahan yang signifikan ?

Dengan diadakannya evaluasi pada sebuah kebijakan program, maka dapat diungkapkan apakah dampak yang diharapkan dari program tersebut sudah tercapai dan sesuai dengan sasaran serta dapat mengukur seberapa besar manfaat yang telah diperoleh.

1.6.5 Dampak Kebijakan

Sumarwoto (dalam bukunya, 1998 : 43), mengartikan adanya sesuatu yang berubah terjadi karena akibat dari sesuatu aktifitas disebut dampak baik sifatnya biologi kimia fisik alami. Manfaat disebut jga sebagai dampak yang positive, sedangkan resiko baik ke non fisik lingkungan (*social economy*) maupun lingkungan fisikk disebut sebagai dampak yang negative. Faktor utama dalam menentukan dampak tersebut salah satunya yaitu untung atau ruginya seorang sasaran kebijakan (*man*) dari kebijakan tersebut.

Menurut Islamy (2001:115), dampak kebijakan adalah “akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijaksanaan kebijaksanaan. Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye dalam Kismartini:2007).

Menurut Budi Winarno (dalam bukunya, 2002), dampak kebijakan adalah suatu konsekuensi dan akibat atau hubungan yang sebenarnya dapat terjadi di suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, menurut Wahab (dalam bukunya, 2009:53) menyatakan bahwa hasil akhir kebijaksanaan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-

benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pernyataan ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa dampak kebijakan secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dari kebijakan yang telah di terapkan. Setiap keputusan yang diambil oleh aktor kebijakan biasanya mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan maka yang perlu dilakukan adalah dengan memperhatikan semua perubahan yang terjadi di lingkungan sebagai akibat dari penerapan suatu kebijakan.

Penerapan kebijakan dapat juga mengakibatkan dampak ekonomi bagi individu, organisasi maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dampak ekonomi dijelaskan oleh Cohen (dalam Dwi, 2015 : 21) terdiri dari, (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan.

Dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes (dalam Disbudpar Banten, 2013 : 20) dikelompokkan dalam tiga indikator, (1) *direct effect* meliputi penjualan, kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) *indirect effect*, meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa, perubahan dalam penyediaan properti dan variasi

pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan, (3) *induced effects*, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan peningkatan pendapatan. Menurut Anonim (dalam Marine Ecotourism for Atlantic Area, 2001) kaitannya dengan pendapatan masyarakat, terdapat tiga kelompok dampak ekonomi yang ada yaitu efek langsung (*Direct Effects*), efek tidak langsung (*Indirect Effects*), dan efek lanjutan / induksi (*Induced Effects*). Dalam penerapannya, efek tidak langsung dan efek induksi kadang kadang disebut sebagai efek sekunder (*Secondary Effects*) yang mengikuti efek langsung sebagai efek primer (*Primary Effect*). Menurut Stynes et al., (2000) dampak langsung adalah perubahan jumlah penjualan, pendapatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Menurut Samodra Wibawa (1994 : 53-59) terdapat beberapa unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan antara lain :

1. Dampak individual, dampak terhadap individu ini dapat menyentuh aspek-aspek antara lain : dampak psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi , dampak sosial dan personal.
2. Dampak organisasional , dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terganggunya atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sementara itu, suatu kebijakan juga dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok, misalnya melalui peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri.

3. Dampak pada masyarakat, dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan suatu unit yang melayani para anggotanya.

4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk melihat apakah suatu sistem sosial tersebut lemah atau tidak, yaitu kelebihan beban, distribusi tidak merata, persediaan sumber daya yang dianggap kurang, adaptasi yang lemah, koordinasi yang jelek, turunnya legitimasi, turunnya kepercayaan, tertutupnya mekanisme koreksi dan adaptasi, diganti dengan sistem kuota.

Menurut Winarno (2016:196) terdapat beberapa dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi :

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.

Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (1984:115) bahwa dampak kebijakan tersebut mempunyai dimensi yaitu :

1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan maupun tidak diharapkan

2. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut
3. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang
4. Dampak kebijaksanaan terhadap biaya langsung
5. Dampak kebijaksanaan terhadap biaya tidak langsung.

Menurut Langbein dalam Wibawa (1994 : 38), dimensi dampak disoroti oleh :

1. Waktu, dimensi ini merupakan dimensi yang penting terkait dengan kebijakan yang memberikan dampak sekarang dan yang akan datang
2. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan, evaluator perlu memperhatikan dampak yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan yang diharapkan
3. Tingkat agregasi dampak

Dampak yang dirasakan secara individual akan dapat mempengaruhi perubahan di masyarakat secara keseluruhan

4. Tipe dampak, yaitu dampak pada kehidupan ekonomi, dampak pada proses pembuatan kebijakan, dampak pada sikap public, dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Kriteria dampak yang digunakan untuk menilai suatu dampak dari penerapan kebijakan ada 6 menurut Freeman and Rosi (dalam Parsons, 2005) antara lain : Probabilitas dampaknya terjadi atau tidak, berapa banyak subjek penerima dampak, Rugi atau untungnya orang yang merasakan

dampak, Ada atau tidaknya data yang digunakan untuk menganalisa, kaitan kebijakan, apakah public memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Penerapan kebijakan dapat mengakibatkan dampak ekonomi bagi individu, organisasi maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam penelitian ini penerapan kebijakan PSBB berdampak terhadap ekonomi para pelaku usaha di Pasar Tanah Abang, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Cohen (dalam Dwi, 2015 : 21) terdiri dari, (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran.

1.6.6 UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), definisi UMKM :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 1.4

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

| Lembaga | Istilah | Pengertian Umum |
|---|----------------|---|
| UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil | Usaha Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Aset \leq Rp.200 juta diluar tanah dan bangunan • Omzet \leq Rp. 1 Miliar/Tahun |
| BPS | Usaha Mikro | Pekerja <5 orang, termasuk tenaga kerja keluarga |
| | Usaha Kecil | Pekerja 5-19 orang |
| | Usaha Menengah | Pekerja 20-99 orang |
| Menteri Negara Koperasi dan UMKM | Usaha Mikro | Aset < Rp 200juta di luar tanah dan bangunan Omzet < Rp 1 Miliar |
| | Usaha Menengah | Aset > Rp 200 juta |
| Bank Indonesia | Usaha Mikro | Omzet Rp 1-10 Miliar |
| | Usaha Kecil | Kegiatan ekonomi rakyat dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan maksimum Rp 1 miliar/tahun |
| | Usaha Menengah | Usaha dengan kriteria memiliki kekayaan bersih 1-10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha |
| Bank Dunia | Usaha Mikro | Pekerja <10 orang Aset < \$ 100.000 Omzet < 3 juta pertahun |
| | Usaha Kecil | Pekerja <50 orang Aset <\$ 3 juta Omzet < 3 juta per tahun |

| | | |
|--|----------------|---|
| | Usaha Menengah | Pekerja < 300 orang Aset <\$ 15 juta Omzet < \$ 15 juta per tahun |
|--|----------------|---|

Sumber : Krisnamurthi, 2003

Tabel 1.4 menjelaskan definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Badan Pusat Statistik, Menteri Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia dan Bank Dunia yang dilihat dari jumlah pekerja, omzet pertahun, asset yang dimiliki oleh tiap klasifikasi UMKM.

Berdasarkan perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok (Arief Rahmana, 2009) yaitu : Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah menurut Arif R. (2009) ada 4, antarlain : Pertama *livelihod activities* yang umumnya diketahui sebagai pedagang kaki lima (sector informal), Kedua *Micro Enterprise*, diketahui sebagai orang-orang yang belum punya jiwa kewirausahaan tapi mempunyai keahlian sebagai pengrajiin, Ketiga *small dynamic enterpriise* diketahui sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah yang sudah menjiwai sifat kewirausahaan sehingga jangkauannya sudah mengalami ketinggian dimana dapat melakukan kegiatan ekspor dan *subcontract*, Keempat *fast moving enterprise* diketahui usaha yang akan mengembangkan usahanya menjadi usaha besar.

1.6.7 Pasar

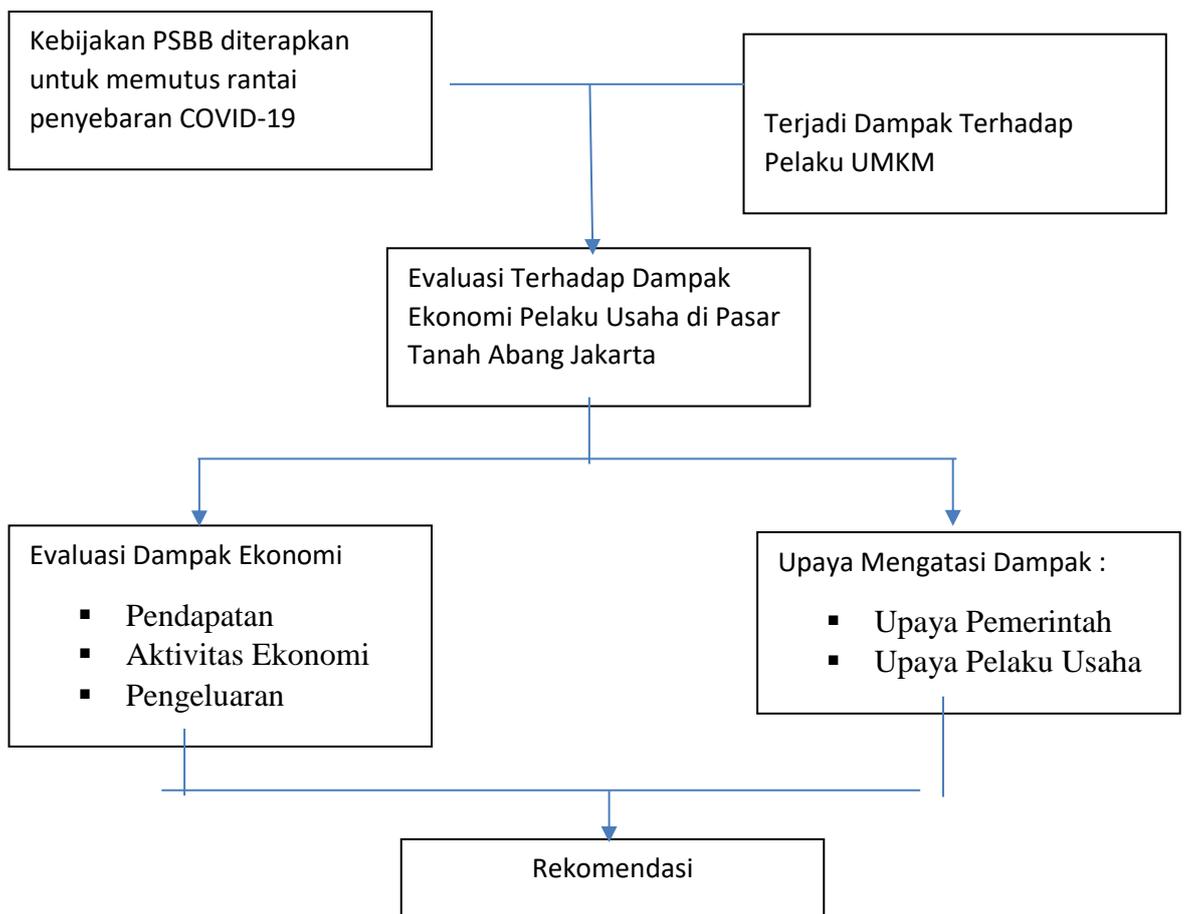
Stanton, J. W (dalam bukunya, 1993) mengartikan pasar sebagai tempat berkumpulnya orang yang memiliki kemauan untuk berbelanja sebuah barang

menggunakan uangnya sehingga menjadi puas. Transaksi antar barang atau jasa seperti bahan pokok, lauk sayuran, tenaga kerja maupun uang terjadi di pasar yang dilakukan oleh pembeli dengan penjual, disini juga terjadi bertemunya *curve* permintaan dengan penawaran. (Budiono, 2002 : 43)

Menurut Handri Ma'aruf Mengatakan bahwa “pasar” memiliki tiga pengertian,yang harus dipenuhi yaitu ada tempat maksudnya ada tepat bertemu antara penjual dan pembeli, ada interaksi yaitu adanya permintaan dan penawaran yang dilakukan penjual dan pembeli dan yang ketiga transaksi dalam sebuah pasar ada proses jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. “Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa” (Rita Hanafie,2010:176).

Bagan 1.1

Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

| Fokus/Tujuan | Fenomena | Indikasi Penelitian |
|---|-----------------------|---|
| Dampak Kebijakan PSBB Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha | 1. Pendapatan | 1. Jumlah pembeli 2. Omzet |
| | 2. Aktifitas Ekonomi | 1. Produksi 2. Permintaan 3. Distribusi |
| | 3. Pengeluaran | 1. Biaya produksi |
| Upaya mengatasi Dampak | 1. Upaya Pemerintah | 1. Bantuan operasional 2. Bantuan tunai |
| | 2. Upaya Pelaku Usaha | 1. Penguasaan teknologi modern 2. Kemampuan marketing dan manajerial 3. Kualitas produk |

Sumber : Penulis

1.8 Desain Penelitian

Desain yang peneliti gunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif Moleong, 2011 : 6 mengatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui, menyelami gejala-gejala yang dirasakan oleh peneliti seperti tindakan, penelitian misalnya, perilaku, pandangan melalui deskripsi kata dengan menggunakan metode-metode ilmiah .

Berdasarkan penjelasan menurut Moleong, diartikan sebagai penelitian yang mana penulis mempunyai keterikatan dengan lokus penelitian, karena penelitian tersebut bergantung pada apa yang diamati oleh peneliti, sehingga hanya peneliti yang bisa menyimpulkan dan mendeskripsikannya. Dokumentasi, kata yang telah diteliti oleh peneliti merupakan data yang digunakan pada penelitian deskriptif. Sumber data tersebut bisa berasal dari notes peneliti, video foto, *private documents*, dan dokumen lain. Penelitian ini mendeskripsikan gejala atau peristiwa dilapangan yang ditemui oleh peneliti.

1.8.1 Situs Penelitian

Merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati gejala/peristiwa di lapangan. Pada penelitian kali ini, lokus penelitiannya ialah Pasar Tanah Abang Jakarta.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber (informan) tentang apa yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penentuan informan ialah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (dalam bukunya 2004:96) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk jumlah informan yang dibutuhkan tidak dapat ditetapkan sejak awal dalam rancangan penelitian ini. Jumlah informan nantinya dalam penelitian ini kondisional jumlahnya sesuai kondisi lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Informan Penelitian

| No. | Nama | Keterangan |
|------------|---|---------------------------|
| 1. | Asisten Manajer Seksi Usaha dan Pengembangan UPB PD Pasar Jaya Tanah Abang Blok A-G | <i>Key Informan</i> |
| 2. | Pelaku Usaha/Owner Toko di Pasar Tanah Abang Jakarta | <i>Key Informan</i> |
| 3. | Pegawai Toko/UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta | <i>Secondary Informan</i> |
| 4. | Masyarakat pelanggan dan non pelanggan Pasar Tanah Abang Jakarta | <i>Secondary Informan</i> |

Tabel 1.5 menunjukkan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, pemilihan informan ditentukan berdasarkan kapasitas yang dimiliki, dapat menjawab apa yang akan diteliti sesuai dengan topik dan tujuan penelitian.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian (informan), baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan penulis sendiri yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta

2. Data Sekunder

Merupakan data yang peneliti butuhkan guna memperoleh informasi dari referensi yang sudah ada. Data tersebut berasal dari dokumen yang berhubungan dengan judul yang peneliti amati antara lain :

- a.) Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- b.) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
- c.) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
- d.) Jurnal Artikel dan Media Massa

1.8.4 Sumber Data

Loofland (dalam Moleong, 2011 : 157) mengartikan bahwa data ialah sesuatu informasi yang dikumpulkan yang digunakan sebagai kumpulan informasi yang dibutuhkan untuk mengamati suatu permasalahan maupun fokus yang diteliti. Sumber utama yang peneliti gunakan dalam penelitiain ini adalah tindakan/kata, *document*, dsbnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui teknik, sebagai berikut:

Pertama wawancara, teknik ini ditafsirkan sebagai bentuk interaksi antar peneliti dan informan yang mana peneliti bertanya kemudian informan menjawab, saling berbagi persepsi terhadap suatu gejala/fenoomena. Dari teknik ini diharapkan peneliti mendapat informasi yang factual, tepat dan akurat sesuai dengan topik yang peneliti sedang amati. (SteewartdanCash,2008)

Kedua dokumentasi, teknik ini diperuntukkan untuk peneliti yang menggunakan metode kualitatif yang mengamati dokumen yang telah ada maupun milik peneliti sendiri, teknik ini juga digunakan untuk menambah lengkap/mendukung suatu tulisan peneliti yang didapat dari hasil wawancara. Dokumen yang bisa digunakan berasal dari *observation*, wawancara, perundangaan, laporan dan pelaksanaan suatu kegiatan, foto arsip sesuai penelitian yang diamati. (Herdiiansyah, 2012).

Ketiga teknik observasi, suatu usaha peneliti untuk mengamati, mencermati suatu gejala/fenomena/peristiwa yang diteliti, peneliti dalam hal ini mencermati bagaimana Dampak PSBB terhadap pelaku pelaku usaha Pasar TanahAbang Jakarta (Cartwright, 2012 ; 131)

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam Penelitian ini digunakan teknik analisis Interaktif Kualitatif. Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Reduksi data (data reduction) Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal – hal pokok, dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal – hal yang penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan mentrasformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14).

2. Penyajian data (data display) Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan

penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Proses selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang didapat dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dari hasil penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.

Penarikan kesimpulan, dalam pandangan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:15), hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

1.8.7 Kualitas Data

Suatu penelitian dibutuhkan keabsahan guna memenuhi standar *validity*, peneliti perlu memenuhi 4 kriteria menurut L.J Moleoong, 2011 antara lain :

Pertama *credibility*, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis untuk *credibility* peneliti, untuk mengecek kredibilitas data dilakukan antara lain pertama teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti berupa memeriksa kembali hasil penelitian kepada berbagai sumber dengan memadankan antara observasi lapangan maupun dokumen dan wawancara, membuat kesimpulan sementara, mendiskusikan kepada peneliti lain, menganalisis kembali hasil penelitian, dan sebagainya. Kemudian kedua kecukupan referensial yang mana peneliti menyatukan referensi, dokumen yang digunakan sebagai data pendukung saat menafsirkan suatu data.

Kedua peneliti melakukan *transferability*, yang mana peneliti melakukan pengumpulan informasi mengenai fakta empiric suatu fenomena yang diteliti. Ketiga peneliti melakukan proses *dependability* sebagai syarat validnya suatu data, peneliti memeriksa keseluruhan tahapan penelitian dan hasil penelitian ke lokus penelitian benar atau tidaknya, dan peneliti melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing, Terakhir peneliti melakukan uji kepastian data *confirmability* dengan mencermati hasil keseluruhan penelitian